

BAB I

PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Desa memiliki pengertian yakni sebuah kesatuan masyarakat hukum yang menempati batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa masyarakat dan hak-hak yang diakui dalam NKRI. Dari pengertian desa yang dijelaskan dalam UU No 6 tahun 2014 tersebut, tertulis dengan jelas bawasannya desa memiliki kewenangan untuk melakukan pemerintahannya sendiri. Yang mana dalam hal ini termasuk urusan keuangannya sekalipun. Dalam mengatur keuangannya, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sepenuhnya yang tentunya haruslah disesuaikan dengan prakarsa masyarakat dan digunakan untuk sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Menurut (Yabbar & Hamzah, 2015) Keuangan desa diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana untuk keuangannya, desa memiliki pemasukan keuangan yang bersumber dari pendapatan desa. Yang mana untuk pendapatan desa dikelompokkan menjadi beberapa komponen. Yakni Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer ataupun pendapatan lain.

Pendapatan Asli Desa (PAD) bersumber dari hasil usaha atau hasil pengelolaan dari usaha (Badan Usaha Milik Desa) dan tanah bengkok, hasil aset yang merupakan

hasil pemasukan dari pemanfaatan aset desa (seperti pemandian umum, jaringan irigasi, tambatan jembatan ataupun pasar desa) dan pendapatan asli desa yang lain. Dalam objek penelitian yang ingin dilakukan, Yakni pada Desa Munggugianti, Kec. Benjeng, Kab. Gresik memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari pengelolaan dari usaha BUMDes yang diberi nama BUMDes "MUGI BANGKIT". Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bergerak dalam berbagai bidang salah satunya ialah pelayanan pembayaran, seperti tagihan listrik, PDAM dan lain-lain. Selain bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), desa juga memiliki pendapatan yang bersumber dari tranfer. Dana transfer bersumber pada Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten/ kota.

Dana Desa (DD) ialah sumber aliran dana yang didapat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diperuntukkan bagi desa dengan pemanfaatan guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. dalam alokasi penggunaannya, tentunya dilakukan secara merata dan tetap dalam prinsip keadilan. Dana Desa (DD) yang merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dikirimkan atau ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan yakni sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer daerah serta dilakukan secara bertahap. Pada desa regular tahap penyaluran Dana Desa dapat dilakukan melalui 3 tahapan, sedangkan pada desa mandiri tahap penyaluran hanya sampai 2 tahap saja.

Tabel 1.1

Relaksasi Penyaluran Dana Desa

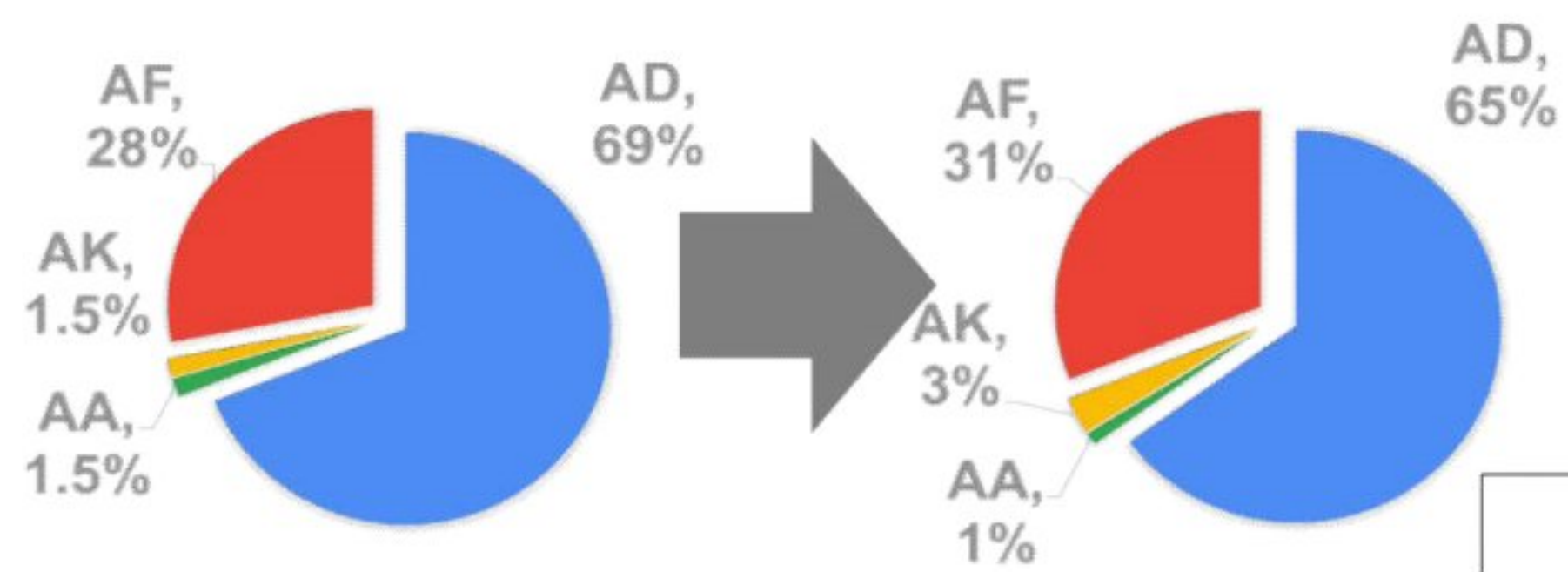
No	Jenis Desa	Prosentase setiap Tahap Penyaluran		
		I	II	III
1.	Desa Reguler	40%	40%	20%
2.	Desa Mandiri	60%	40%	-

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel yang disajikan dapat diketahui bawasannya prosentase setiap tahap penyaluran berbeda. Dan perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satu factor yang mempengaruhi ialah status dari desa tersebut. dari penyaluran tersebut, diharapkan agar desa dapat memanfaatkan Dana Desa (DD) yang diperoleh secara tepat dan tentunya bertanggung jawab. Dan apabila Dana Desa (DD) tidak dialokasikan dengan semestinya, maka penyaluran di tahap berikutnya bisa jadi tidak akan terealisasi. Salah satu pengalokasian Dana Desa (DD) yang diterima ialah dengan dianggarkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penganggaran BLT ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Pasalnya peraturan yang mengatur tentang keharusan penganggaran dari BLT inipun sudah cukup jelas diatur dalam PMK 50/2020 dan PMK 101/2020. Dan dalam peraturan tersebut juga tertuang mengenai penghentian untuk penyaluran dari Dana Desa (DD) apabila tidak dianggarkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Hal ini memberikan arti bawasannya pemanfaatan dari Dana Desa (DD) haruslah sesuai dengan ketentuan.

Seringkali besarnya Dana Desa antara desa satu dengan yang lain tidak sama. Hal ini karena pembagian jumlah dari Dana Desa (DD) sendiri tentunya telah disesuaikan dengan beberapa factor. Salah satunya factor yang dijadikan indikasi dalam penyaluran Dana Desa (DD) ialah factor jumlah penduduk, angka kemiskinan serta kinerja.

Gambar 1.1
Formula Penyaluran Dana Desa (DD)
Tahun 2020 - 2021



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Keterangan :

- AD (Alokasi Dasar) = Pembagian Dana Desa (DD) secara merata kepada setiap desa disesuaikan dengan jumlah penduduk.
- AF (Alokasi Formula) = Pembagian Dana Desa (DD) didasarkan pada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- Alokasi Afirmatif (AA) = Dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki angka kemiskinan yang masih tergolong sangat tinggi.
- Alokasi Kinerja (AK) = Bawasannya pembagian Dana Desa dibagikan menurut indikator desa yang memiliki kinerja terbaik.

Dari penyaluran Dana Desa (DD) yang telah diterima, Pemerintah Desa (PemDes) haruslah memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dari Dana Desa haruslah meninjau kondisi yang tengah dihadapi oleh desa terlebih dahulu. Dalam sector pembangunan pun demikian. Pembangunan yang akan dilakukan menggunakan Dana Desa (DD) haruslah dilakukan melalui peninjauan sebelumnya. Dengan ini nantinya akan dapat dihasilkan suatu hasil yang baik dari pengelolaan Dana Desa (DD).

Hasil yang maksimal dari pengelolaan Dana Desa (DD) dapat dicapai apabila dalam pengelolaannya masih memperhatikan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk membahas mengenai nilai *value for money* yang meliputi nilai ekonomis, efisiensi dan juga efektifitas dari pengelolaan Dana Desa pada Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Munggugianti, Kec. Benjeng, Kab. Gresik sudah memenuhi nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui terkait nilai ekonomis, efisiensi dan juga efektifitas dari pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Munggugianti, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Umum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomis, efisiensi dan juga efektifitas pengelolaan Dana Desa sesuai dengan potensi sumber daya desa bagi siapa saja yang membacanya.

2. Manfaat untuk Pemerintah Desa

Tentunya dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa selaku pihak pengelola Dana Desa agar lebih meninjau kembali terkait nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dari Dana Desa yang sudah dijalankan.

3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih dalam lagi oleh peneliti selanjutnya.